

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 November 2021 (19 s.d 25 November 2021)

MENCEGAH MAFIA TANAH DENGAN PEMBENAHAN SISTEM OTENTIFIKASI LAHAN



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Prianter Jaya Hairi, S.H., L.L.M.
Peneliti Muda/Hukum Pidana
prianter.hairi@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Maraknya permasalahan hukum yang melibatkan “mafia tanah” kembali mengguncang dunia hukum Indonesia. Belum lama ini, seorang publik figur bernama Nirina Zubir beserta keluarganya mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Nirina Zubir mengatakan, kasus yang dialami keluarganya tersebut melibatkan pihak terdekat yakni mantan asisten rumah tangga (ART)nya. Pihaknya menduga proses penggelapan aset tersebut telah dilakukan mantan ARTnya sejak 2017.

Nirina mengatakan mantan ARTnya tersebut dibantu tiga orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat. Nirina juga mengaku menyayangkan adanya notaris yang turut membantu penggelapan aset yang dilakukan oleh mantan ART. Nirina mengaku sudah melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penggelapan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Total ada lima pihak yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian. Mereka yang dilaporkan adalah Riri Khasmita selaku mantan ART, Edrianto selaku suami ART, dan tiga orang pihak PPAT atas nama Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Riduan.

Persoalan ini menyita perhatian luas publik, termasuk dari Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Rifqi menilai kasus mafia tanah yang melibatkan oknum notaris dan mantan ART Nirina akibat kinerja Kementerian ATR/BPN yang tidak maksimal. Dikatakan bahwa sampai saat ini, kinerja prosedur verifikasi dan otentifikasi kepemilikan tanah di Kementerian ATR/BPN masih terbilang tidak maksimal. Hal itulah yang menjadi celah para 'mafia' bermain dengan leluasa. Lebih lanjut Rifqi juga menyatakan, bahwa tumpang tindih sertifikat tanah menjadi modus utama para mafia tanah yang mustahil dilakukan jika tidak bekerja sama dengan "oknum" orang dalam. Terkait hal itu, Rifqi mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera berhasil membuat sistem otentifikasi dan verifikasi penggunaan dan kepemilikan lahan secara baik, transparan, dan akuntabel.

SUMBER

cnnindonesia.com, 18 November 2021; republika.co.id, 24 november 2021.